SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2021-2024

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Edi Ilham Suryadi Nasution
E1031201027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAMMENGATASI KEMACETAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2021-2024

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memeperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Edi Ilham Suryadi Nasution
NIM E1031201027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2021-2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Edi Ilham Suryadi Nasution
E1031201027

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama :

Dr.Yulius Yohanes, M.Si
NIP.19640527199202100

Tanggal 23 September 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Ully Nuzulian S.I.P. M.Si
NIP.198007302003122002

Tanggal 2 Juni 2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2021-2024

Oleh:

Edi Ilham Suryadi Nasutiom
E1031201027

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: 9 Juli 2026
Waktu	: 09-00-Selesai
Tempat	: Ruang A7 Gedung A

TIM PENGUJI

Ketua

Dr.Yulius Yohanes, M.Si
NIP.196405271992021001

Sekretaris

Ully Nuzulian, S.IP, M.Si
NIP.198007302003122002

Penguji Utama

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP.198306272006042020

Penguji Pendamping

Dwi Nur Handayani, S.Sos, M.AP.
NIP.199201212022032007

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr.Herlan, S.Sos, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Edi Ilham Suryadi Nasution: Analisis Fungsi Pelaksanaan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Pontianak Tahun 2021-2024. **Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana fungsi Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan di Kota Pontianak Tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak dan SATLANTAS Polresta Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori Ryaas Rasyid (dalam Labolo 2006, 59) yang berpendapat bahwa ada empat fungsi pemerintah yaitu Pelayanan, Pemberdayaan, Pembangunan, Pengaturan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi pemerintah sudah dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Pelayanan, Pemberdayaan, Pembangunan, dan Pengaturan sudah dilakukan guna mengatasi berbagai masalah kemacetan yang ada di Kota Pontianak. Tentu hal ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dari pihak pemerintah dan pihak terkait termasuk masyarakat untuk dapat menciptkan kenyaman dan keamanan dalam berkendara sehingga Kota Pontianak dapat mengatasi masalah kemacetan yang ada.

Kata Kunci: Fungsi Pemerintah, Kemacetan, Mengatasi Masalah

ABSTRACT

Edi Ilham Suryadi Nasution: Analysis of the Functions of the Pontianak City Transportation Agency in Implementing Policies to Address Traffic Congestion in Pontianak City from 2021 to 2024. Undergraduate Thesis. **Government Study Program in Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Tanjungpura, Pontianak.**

This thesis aims to describe and analyze the functions of the Transportation Agency in addressing traffic congestion in Pontianak City from 2021 to 2024. This study employs a descriptive research design with a qualitative approach, using data collection techniques consisting of observations, interviews, and documentation. The research informants consisted of the Head of the Traffic and Road Transportation Division of Pontianak City and the Traffic Unit (*SATLANTAS*) of the Pontianak City Police. This study applies Ryaas Rasyid's theory (in Labolo, 2006, p. 59), which states that there are four functions of government: service, empowerment, development, and regulation. The results show that the functions of government have been implemented by the Pontianak City Transportation Agency. Service, empowerment, development, and regulation have been implemented to address various traffic congestion problems in Pontianak City. This is expected to serve as a positive starting point for the government and relevant stakeholders, including the community, to create comfort and safety for road users so that Pontianak City can address its existing traffic congestion problems.

Keywords: Government Functions, Traffic Congestion, Problem Solving.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **"Analisis Fungsi Pelaksanaan Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Pontianak Tahun 2021–2024"**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Pontianak. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kepadatan lalu lintas pada beberapa ruas jalan, terutama pada jam sibuk. Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, efisiensi waktu, konsumsi bahan bakar, dan kenyamanan pengguna jalan. Selain kemacetan, masih ditemukan permasalahan seperti parkir sembarangan, rendahnya disiplin pengguna jalan, serta keterbatasan sarana dan prasarana transportasi.

Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki peran penting dalam menangani permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan, program, pelayanan, serta pengaturan lalu lintas. Namun, masih adanya kemacetan pada beberapa titik menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan fungsi Dinas Perhubungan perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya dalam mengatasi kemacetan selama tahun 2021–2024.

Penelitian ini menggunakan teori fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo, yang terdiri dari empat fungsi, yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan. Keempat fungsi tersebut digunakan

sebagai pisau analisis untuk melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan keempat fungsi tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kemacetan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, seperti pejabat atau petugas Dinas Perhubungan serta masyarakat pengguna jalan. Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelayanan telah dilaksanakan melalui pengaturan lalu lintas pada titik rawan kemacetan, pengoperasian sistem pengendalian lalu lintas, serta penyediaan fasilitas pendukung keselamatan jalan. Pelaksanaan tersebut membantu kelancaran lalu lintas, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan personel dan peningkatan volume kendaraan.

Pada fungsi pemberdayaan, Dinas Perhubungan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jalan secara tertib. Namun, masih ditemukan rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat, seperti parkir sembarangan, penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi, dan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang dapat memicu terjadinya kemacetan. Pada fungsi pembangunan, Dinas Perhubungan melakukan pengembangan dan penyediaan sarana serta prasarana pendukung transportasi, antara lain pemasangan rambu lalu lintas, pemeliharaan fasilitas, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, dan penataan kawasan parkir. Upaya tersebut memberikan dukungan terhadap kelancaran lalu lintas. Akan tetapi, pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat dan keterbatasan kapasitas infrastruktur menyebabkan kemacetan masih terjadi pada beberapa ruas jalan utama.

Selanjutnya, pada fungsi pengaturan, Dinas Perhubungan melaksanakan kebijakan dan rekayasa lalu lintas untuk mengendalikan arus kendaraan serta mengurangi kepadatan. Pelaksanaan fungsi ini didukung oleh koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kepolisian dan Pemerintah Kota Pontianak. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat dan keterbatasan pengawasan di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan dalam upaya mengatasi kemacetan selama tahun 2021–2024. Berbagai program dan kebijakan telah memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lalu lintas, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Faktor yang menjadi penghambat antara lain meningkatnya jumlah kendaraan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, serta keterbatasan sumber daya dan pengawasan. Sementara itu, koordinasi antarinstansi, keberadaan teknologi pengendalian lalu lintas, serta pelaksanaan program dan pelayanan Dinas Perhubungan menjadi faktor yang mendukung upaya penanganan kemacetan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan diharapkan dapat semakin optimal dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan kelancaran serta kenyamanan lalu lintas di Kota Pontianak.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Edi Ilham Suryadi Nasution

Nomor Mahasiswa : E1031201027

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya didalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 4 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



Edi Ilham Suryadi Nasution
NIM E1031201027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu"

(Edi Ilham Suryadi Nasution)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Yang pertama, untuk diri saya sendiri. Dalam setiap halaman ini, terukir perjuangan untuk mencapai cita-cita. Bukan hanya mengejar gelar, tetapi juga mengejar pengetahuan dan pengalaman berharga dihidup saya.

2. Selanjutnya saya persembahkan skripsi ini kepada dua sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih tak terhingga untuk ayah saya tercinta **Abdullah Nasution** dan ibu tercinta **Ernawati** yang telah mendidik dan membimbing dalam melalui setiap perjalanan hidup saya.

3. Juga untuk kedua abang saya, **Ridwansyah Nasution** dan **Irsandi Nasution**, yang selalu mendukung dan mendoakan segala usaha yang saya lakukan

termasuk penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak mereka menjadi orang yang sukses dan bisa berguna bagi bangsa dan keluarganya.

4. Teruntuk sahabat-sahabat saya seperjuangan yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri, dengan rasa terima kasih yang besar dan tulus saya ucapkan atas dukungan mereka selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini yang berjudul "Analisis Fungsi Pelaksanaan Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Pontianak Tahun 2021-2024".

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk skripsi pada program sarjana (S.1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Selanjutnya penulis menyadari keterbatasan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, karena penulisan skripsi ini merupakan awal dari perjalanan intelektual yang penulis peroleh. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatankali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Herlan, S,Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Yulius Yohanes, M.Si Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama

proses penulisanusulan penelitian ini.

5. Ully Nuzulian S.I.P., M.Si. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan usulan penelitian ini.
6. Rulida Yuniarsih, S.I.P,M.Si. Selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
7. Dwi Nur Handayani, S.Sos, M.A.P. Selaku Dosen Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Pontianak beserta seluruh jajaran yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini agar bermanfaat dan dapatdikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Pontianak, 28 Juni 2026

Penulis

EDI ILHAM SURYADI NASUTION

E1031201027

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 11
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah 12
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.6.1 Manfaat Teoritis 12
1.6.2 Manfaat Praktis 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1 Definisi Konsep 14
2.1.1 Pemerintah 14
2.1.2 Konsep Kemacetan 17
2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan 19
2.2 Teori Fungsi Pemerintah 21
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 25
2.4 Alur Pikir Penelitian 27
2.5 Pertanyaan Penelitian 29

BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Langkah Langkah Penelitian 30
3.2.1 Tahap Pra Survey 30
3.2.2 Penyusunan Outline Penelitian 31
3.2.3 Penyusunan Usulan Penelitian 31
3.2.4 Seminar Proposal 32
3.2.5 Penelitian Lapangan 32
3.2.6 Penyusunan Laporan Penelitian 32
3.2.7 Ujian Skripsi 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 33
3.3.1 Lokasi Penelitian 33
3.3.2 Waktu Penelitian 33
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 35
3.4.1 Subjek Penelitian 35
3.4.2 Objek Penelitian 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Instrumen Penelitian 38
3.7 Analisis Data 38
3.7.1 Teknik Keabsahan Data 38
3.7.2 Teknik Analisis Data 41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 43
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak 43
4.1.1 Keadaan Geografis 43
4.1.2 Kondisi Demografis 45
4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pontianak 47
4.2.1 Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak 47
4.2.2 Struktur Organisasi 48

4.2.3 Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak 50
4.3 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pontianak 57
4.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak 59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
5.1 Hasil Penelitian 61
5.2 Gambaran Titik-Titik Kemacetan di Kota Pontianak 65
5.2.2 Persimpangan Jalan Tanjung Raya 1 dan 2 65
5.2.2 Jalan Imam Bonjol Simpang Jalan Daya Nasional 67
5.2.3 Persimpangan Jalan Karet 68
5.3 Pembahasan 72
5.3.1 Fungsi Dinas Perhubungan Sebagai Fungsi Pelayanan 72
5.3.2 Fungsi Dinas Perhubungan Sebagai Fungsi Pemberdayaan 75
5.3.3. Fungsi Dinas Perhubungan Sebagai Fungsi Pembangunan 80
5.3.4 Fungsi Dinas Perhubungan Sebagai Fungsi Pengaturan 86
5.4 Analisis Hasil Penelitian 91
BAB VI PENUTUP 95
6.1 Kesimpulan 95
6.2 Saran 98
6.3 Keterbatasan Penelitian 100
DAFTAR LAMPIRAN 106

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Pontianak..... 6

1.2 Data Kenaikan Penduduk Dari Tahun 2021-20241.....10

2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 25

3.1 Waktu Penelitian.....34

4.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak.....44

4.2 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kota Pontianak Tahun 2022.....46

5.1 Titik-Titik Kemacetan dan Upaya Penanganannya.....70

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1 Peta Kota Pontianak 44
4.2 Dinas Perhubungan Kota Pontianak.....47
4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak.....50
5.1 Kondisi Kemacetan Di Persimpangan Jalan Tanray 1&2.....66
5.2 Kondisi Kemacetan Di Jalan Imam Bonjol.....68
5.3 Kondisi Kemacetan Di Persimpangan Jalan Karet.....69
5.4 Pembinaan Tukang Parkir Agar Tertib Dalam Pengelolaan Parkir.....76
5.5 Pengoperasian Kembali Bus Rapid Transit.....81
5.6 Pelebaran Jalan Sultan Hamid II.....84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Pontianak, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini mencakup aspek demografis, ekonomi, dan infrastruktur yang mengakibatkan peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Meskipun perkembangan ini menunjukkan kemajuan, hal tersebut juga membawa tantangan besar dalam hal transportasi, khususnya kemacetan lalu lintas yang semakin parah.

Kemacetan adalah ketika arus lalu lintas melebihi kapasitas rencana jalan sehingga kecepatan bebas ruas jalan mendekati 0 km/jam atau bahkan menjadi 0 km/jam, menyebabkan antrian (Basuki, 2008). Hal ini biasanya disebabkan oleh volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, ruas jalan yang sempit, banyaknya parkir liar dan permasalahan lain seperti perbaikan jalan atau persimpangan yang tidak efisien. Persimpangan yang tidak efisien merujuk pada titik pertemuan jalan di mana aliran lalu lintas tidak berjalan lancar. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lampu lalu lintas yang tidak tepat, desain persimpangan yang kurang baik, atau volume kendaraan yang terlalu tinggi. Akibatnya, waktu tunggu kendaraan menjadi lebih lama.

Dampak dari kemacetan mencakup waktu tempuh yang lebih lama, polusi udara yang meningkat, serta potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mengatasi kemacetan menjadi prioritas utama bagi pengelolaan kota yang berkelanjutan dan efisien. Masalah ini mengakibatkan kemacetan yang tidak hanya mengganggu mobilitas sehari-hari, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan lingkungan kota terutama bagi para pengemudi (Suhardiyanto, 2016)

Bagi pengemudi, kemacetan dapat menimbulkan ketegangan dan stress. Dari segi ekonomi, kemacetan membuat seseorang kehilangan waktu di jalan yang menyebabkan orang tersebut terlambat datang ke tempat kerja. Hal tersebut tentunya dapat menurunkan produktivitas kerja seseorang. Selain itu, kemacetan juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan seperti meningkatnya polusi udara dan suara akibat banyaknya kendaraan di jalan raya.

Kemacetan dapat mengakibatkan waktu perjalanan menjadi lebih lama, peningkatan polusi udara, serta dampak negatif lainnya pada efisiensi transportasi dan kualitas hidup. Hal ini harus menjadi fokus pemerintah Kota Pontianak terutama dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap masalah kemacetan yang ada di Kota Pontianak yaitu Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Berlandaskan pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Pontianak. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan.

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

Berdasarkan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, fungsi yang paling berkaitan dengan mengatasi masalah kemacetan adalah:

1. Perumusan kebijakan bidang perhubungan

Fungsi ini berkaitan dengan kemacetan karena Dinas Perhubungan berwenang menyusun kebijakan dan strategi untuk mengatur lalu lintas, misalnya:

a. Penyusunan kebijakan manajemen lalu lintas.
b. Pengaturan pola pergerakan kendaraan.
c. Penentuan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan yang mengalami kepadatan.

d. Pengembangan sistem transportasi yang mengurangi penumpukan kendaraan.

2. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan *(fungsi yang paling langsung terkait)* Fungsi ini merupakan bagian utama dalam penanganan kemacetan karena mencakup pelaksanaan kegiatan teknis seperti:

a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas (pengaturan arus kendaraan, perubahan arah lalu lintas, pengaturan simpang, jalur satu arah, dan sebagainya).
b. Pengaturan dan pengawasan lalu lintas di titik rawan macet.
c. Pengelolaan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas.
d. Pengaturan angkutan umum agar tidak menghambat arus lalu lintas.
e. Pengendalian parkir yang dapat menyebabkan penyempitan jalan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan kemacetan melalui pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, khususnya dalam aspek manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kemacetan yang terjadi di wilayah perkotaan tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pergerakan transportasi, penggunaan ruang jalan yang tidak optimal, aktivitas parkir di badan jalan, serta kurang efektifnya pengaturan arus lalu lintas. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan berbagai strategi pengendalian lalu lintas guna menciptakan sistem transportasi yang

lebih tertib, aman, dan lancar.

Dengan demikian, keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengatasi masalah kemacetan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan perhubungan, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan dalam menyesuaikan strategi dengan perkembangan mobilitas masyarakat. Penanganan kemacetan tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga memerlukan pengelolaan sistem transportasi yang terpadu melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, fungsi Dinas Perhubungan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kelancaran lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kota Pontianak.

Menurut data BPS Provinsi Kalimantan Barat yang menggunakan data Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak hingga tahun 2024 berjumlah 932.518 unit. Beriku adalah data tabel jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2021-2024:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah(Unit)	Persentase Kenaikan
2021	853.170	
2022	881.641	(3,34%)
2023	907.774	(2,96%)
2024	932.518	(2,73%)

Sumber: Polda Kalimantan Barat Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jumlah kendaraan yang ada di Kota Pontianak sangat tinggi, kemudian disusul dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Pontianak yang sangat tinggi sering kali tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai,hal inilah menyebabkan kemacetan di Kota Pontianak tidak dapat dihindari, sehingga ini merupakan suatu masalah yang menjadi tanggung jawab semua warga Kota Pontianak terutama dalam hal ini adalah Dinas perhubungan.

Secara umum, jumlah dan kapasitas ruas jalan di Kota Pontianak saat ini sudah tidak cukup untuk menampung pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat masif. Ketidakseimbangan ini memicu munculnya titik-titik kemacetan parah, terutama pada jam sibuk pagi sore hari. Berdasarkan kajian lalu lintas, rata-rata nilai *Volume to Capacity* (V/C) pada ruas-ruas jalan utama rawan macet di Kota Pontianak berada di

angka 0,78. Angka ini mengindikasikan bahwa arus lalu lintas berada dalam kondisi sangat padat, tidak lancar, dan kecepatan kendaraan menurun drastis.

Di area pusat bisnis (CBD) seperti koridor Jalan Gajah Mada, nilai rasio fluktiatifnya bahkan berkisar antara 0,69 hingga 0,76 pada jam jam tersibuk. Kemudian, Geografi Kota Pontianak yang terbelah oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak membuat pergerakan masyarakat sangat bergantung pada jembatan. Penumpukan kendaraan kronis sering terjadi di area Jembatan Kapuas I dan koridor Jalan Imam Bonjol. Kemacetan dipicu oleh fenomena penyempitan jalan (*bottleneck)* dari jalan tipe mayor yang lebar ke jalan penghujung jembatan yang lebih sempit.

Kemudian ketiadaan sistem transportasi massal yang memadai memaksa sebagian besar warga menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini diperparah oleh tingginya hambatan samping di jalan-jalan protokol, seperti banyak nya kendaraan yang parkir di bahu jalan depan pertokoan atau pusat kuliner, serta aktivitas keluar masuk kendaraan di persimpangan jalan lingkungan.

Akibatnya, kecepatan kendaraan menurun, waktu tempuh meningkat, dan antrean kendaraan sering kali terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi semakin memperburuk tingkat kemacetan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi akibat pemborosan waktu dan bahan bakar, tetapi juga meningkatnya emisi gas buang yang

berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan lalu lintas yang lebih terintegrasi, termasuk pengembangan transportasi umum yang andal, penertiban aktivitas parkir di badan jalan, serta peningkatan manajemen akses pada kawasan komersial dan permukiman guna menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Selain faktor pertumbuhan kendaraan, rendahnya disiplin pengguna jalan juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat kemacetan di kawasan perkotaan. Perilaku seperti berhenti sembarangan, parkir pada bahu atau badan jalan, pelanggaran rambu lalu lintas, serta aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi yang tidak semestinya dapat mengurangi kapasitas efektif jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas menjadi tidak stabil, meningkatkan potensi konflik antarkendaraan, serta menurunkan tingkat pelayanan jalan. Oleh karena itu, penegakan peraturan lalu lintas yang konsisten dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran mobilitas.

Menurut Notoatmodjo (2002)**,** masalah adalah suatu kesenjangan (*gap*) antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat berupa perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara teori dan praktik, maupun antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Sugiyono (2013) “masalah adalah keadaan yang tidak

diinginkan dan membutuhkan perhatian, serta memerlukan pemecahan untuk mencapai hasil yang diinginkan". Hal ini sangat berkaitan dengan masalah yang sedang peneliti angkat, bagaimana kemacetan ini merupakan sebuah masalah yang perlu dipecahkan dan dicarikan solusinya melalui kerjasama antara instansi pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan masyarkat Kota Pontianak itu sendiri, sehingga dapat terciptanya Kota Pontianak yang bebas dari kemacetan.

Kemacetan di Kota Pontianak sering terjadi di beberapa titik persimpangan dan jalan, contohnya di Persimpangan menuju Jembatan Tol Kapuas 1, kemudian Persimpangan menuju Jalan Tanjung Raya 1 dan 2, Jalan Imam Bonjol dan Persimpangan Jalan Karet, keadaan ini sering terjadi terutama di pagi dan sore hari.

Kemudian terkait dengan jumlah penduduk, menurut data dari Badan Statistik Kota Pontianak (2024) Kota Pontianak mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 1,7% per tahunnya. Berikut adalah data kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2021-2024 :

Tabel 1.2

Data Kenaikan Penduduk Dari Tahun 2021-2024

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
2021	**663.713,0**
2022	**669 795,0**
2023	**675.468,0**
2024	**682.896,0**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2024

Dilihat dari data diatas bagaimana jumlah penduduk Kota Pontianak mengalami kenaikan disetiap tahunnya, kemudian dari data diatas juga artinya ada 1 orang yang punya 2 kendaraan bahkan 3 kendaraan atau lebih, oleh karena itu kenaikan jumlah kendaraan lebih tinggi dari jumlah penduduk, hal ini yang menyebabkan masalah kemacetan di Kota Pontianak masih sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penting untuk dicatat bahwa meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan beberapa wawasan mengenai faktor penyebab kemacetan di Kota Pontianak, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Penelitian sebelumnya yang berjudul "Analisis Tingkat Kemacetan dan Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Sultan Hamid II Di Kecamatan Pontianak Selatan" Oleh Ega Safira Tahun 2023, cenderung belum mengungkap secara menyeluruh menjelaskan mengenai fungsi Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan di Kota Pontianak serta dampaknya terhadap dinamika

kemacetan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam fungsi Dinas Perhubungan dalam penanganan kemacetan di Kota Pontianak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dikemukakan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan, pelayanan transportasi publik belum optimal sehingga masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi
2. Fungsi Pemberdayaan, kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan lalu lintas belum maksimal
3. Fungsi Pembangunan, pertumbuhan kendaraan belum seimbang dengan kapasitas infrastruktur jalan
4. Fungsi Pengaturan, masih terdapat kepadatan lalu lintas dan hambatan dalam pengendalian lalu lintas

1.3 Fokus Penelitian

Menganalisis pelaksanaan fungsi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas tahun 2021–2024 berdasarkan perspektif fungsi pemerintah menurut Ryaas Rasyid, yang meliputi fungsi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi pelaksanaan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengatasi kemacetan ditinjau dari fungsi pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang meliputi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pelaksanaan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengatasi kemacetan lalu lintas tahun 2021-2024, mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam pengelolaan transportasi perkotaan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana peran dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah

dalam mengatasi permasalahan kemacetan melalui pelaksanaan fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bagi Peneliti :

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan transportasi daerah, khususnya dalam mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Pontianak. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan teori dan konsep yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam analisis permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi pemerintah Kota Pontianak :

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.